

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK
USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(E-WARONG KUBE PKH) DI KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Disusun oleh :

Nama : Rizki Hudi Oentoro
NPM : 1762002118
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat

Guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MEGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

**PROGRAM STUDI APN MEGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rizki Hudi Oentoro
NPM : 1762002118
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Elektronik Warung Gotog Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat
Judul Tesis : Community Empowerment Strategy Through Electronic Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) in Palmerah District, West Jakarta Administrative City

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis



Dr. Edy Sutrisno, M.Si

**PROGRAM STUDI APN MEGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : RIZKI HUDI OENTORO
NPM : 1762002118
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTOG
ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

Telah mempertahankan Tesis di hadapan Penguji Tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Juni 2021
Pukul : 08.00 WIB s.d 09.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Anggota : Dr. Asropi, M.Si
Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, M.Si



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rizki Hudi Oentoro
NPM : 1762002118
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 19 Juni 2021



Rizki Hudi Oentoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, berkah dan rahmat-Nya telah memberikan Kesehatan kepada saya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tepat pada waktunya.

Adapun judul Tesis ini adalah “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”, Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Dr. Mala Sondang Silitonga, MA selaku Ketua Tim Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir (Tesis)
3. Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik dan Sekretaris Tim Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir (Tesis)
4. Dr. Asropi, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister Terapan dan Anggota Tim Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir (Tesis)

5. Jajaran Dosen serta staf Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister.
6. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat beserta jajarannya
7. Koordinator Daerah selaku Pelaksanaan BPNT Kota Administrasi Jakarta Barat, Pendamping PKH dan TKSK Palmerah.
8. Camat Palmerah dan Para Lurah se Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Ketua E-Warong KUBE PKH se Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat.
10. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Magister Terapan.
11. Orang tua dan istri tercinta serta keluarga besar yang telah senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa hingga terselesaikannya tesis ini.
12. Serta seluruh pihak yang terkait dalam pembuatan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Akhirnya Penulis berharap semoga tesis ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya serta dapat memberikan manfaat khususnya untuk Ilmu Administrasi Publik.

Jakarta, Juni 2021

Rizki Hudi Oentoro

ABSTRAK

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Rizki Hudi Oentoro¹⁾, Edy Sutrisno²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi APN dan ²⁾Dosen Pembimbing Program Studi APN
Politeknik STIA LAN Jakarta

Program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH yang melibatkan masyarakat, pada awal pelaksanaan memiliki beberapa permasalahan seperti lokasi E-Warong tidak memadai, Sumber Daya Manusia Pengelola E-Warong belum terorganisir, terkendala ketersediaan mesin gesek pembayaran/*Electronic Data Capture* (EDC), Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif,

Berdasarkan hasil penelitian strategi pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat jika dilihat dari 3 aspek, pertama aspek pemungkinan, Pemerintah sesuai dengan perannya telah dapat menghapus sekat-sekat budaya serta sekat struktural pada pengelola E-Warong KUBE PKH dengan pendampingan, pembinaan serta sosialisasi. Pada Aspek Penyokongan Pemerintah telah memberikan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha serta melakukan pembinaan dan pelatihan. Pada Aspek Pemeliharaan telah memberikan kesempatan untuk menjadi pengelola E-Warong KUBE PKH, melakukan kunjungan, melalui TKSK mengadakan program *refreshing* untuk penguatan internal. Pada penelitian ini menunjukkan belum tercapainya program pemberdayaan masyarakat dengan dibuktikan pengelola E-Warong KUBE PKH kurang berinovasi dan mandiri dalam mengelola E-Warong. Rekomendasi dari penelitian ini adalah membuat strategi pemberdayaan berupa penguatan pendamping dan TKSK dengan pemberian insentif yang layak, meningkatkan kapasitas kewirausahaan dengan mengikutsertakan pada program Jakpreneur, Menguatkan Monitoring pelaksanaan program bersama kelurahan, menguatkan pengelola dengan pemberian *reward*

Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, E-Warong KUBE PKH

ABSTRACT

Community Empowerment Strategy Through Electronic Warung Gotong Royong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH)
in Palmerah, West Jakarta

Rizki Hudi Oentoro¹⁾, Edy Sutrisno²⁾
Student of APN Program and ²⁾ APN Program Supervisor
Politeknik STIA LAN Jakarta

The community empowerment program through the *E-Warong KUBE PKH* which involved the community, at the beginning of its implementation had several problems such as the location of the *E-Warong* was inadequate, Human Resources for the *E-Warong* administrators were not organized, constrained by the availability of Electronic Data Capture (EDC). This study aims to develop a strategy for community empowerment through *E-Warong KUBE PKH* in Palmerah, West Jakarta.

This research was conducted in Palmerah, West Jakarta. The study has been conducted using descriptive research methods based on qualitative approach. Based on the results of the research on community empowerment strategies through *E-Warong KUBE PKH* in Palmerah, West Jakarta, when viewed from 3 aspects, it implied, first, the Aspect of possibility, the Government in accordance with its role has been able to remove cultural barriers and structural barriers to *E-Warong KUBE PKH* administrators with assistance, coaching and socialization. In the Support Aspect, the Government aided with the development of business facilities as well as providing guidance and training. The Maintenance Aspect has provided the opportunity to become the administrators of the *E-Warong KUBE PKH*, visitation, through *TKSK* that held a refreshing program for internal strengthening. This study shows that the community empowerment program has not yet been achieved, as evident by the management of *E-Warong KUBE PKH* which is less innovative and independent in managing *E-Warong*. Recommendations from this research are to create an empowerment strategy in the form of strengthening mentors and *TKSK* by providing appropriate incentives, increasing entrepreneurial capacity by participating in the Jakpreneur program, Strengthen Monitoring of program implementation with sub-districts, strengthening administrators by providing rewards.

Keywords: Community Empowerment, *E-Warong KUBE PKH*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumus Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	26
1 Tinjauan Kebijakan	26
2 Tinjauan Teoritis	28
a. Perencanaan Pembangunan	28
b. Partisipasi Masyarakat	32
c. Pemberdayaan Masyarakat	35
d. Penilaian Efektifitas	47
e. Bantuan Pangan Non Tunai	50
f. Prosedur Pembentukan E-Warong KUBE PKH	51
g. Konsep Kunci	53

C. Model Berpikir	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Metode Penelitian	55
B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	57
1. Teknik Pengumpulan Data	57
a. Wawancara	58
b. Observasi	58
2. Jenis Data	59
a. Data Primer	59
b. Data Sekunder	61
C. Pengolahan Data dan Analisis Data	62
1. Pengolahan Data	62
2. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Kondisi Geografis	64
2. Kondisi Demografis	65
B. Gambaran Umum E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah	67
C. Penyajian Data dan Pembahasan	75
1. Aspek Pemungkinan	75
2. Aspek Penyokongan	83
3. Aspek Pemeliharaan	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	96
A. Simpulan	95
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran-lampiran	107
Riwayat Hidup Penulis	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Penanggulangan Kemiskinan	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta	3
Tabel 1.3	Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial	4
Tabel 1.4	Daftar E-Warong KUBE PKH di Jakarta Barat	8
Tabel 3.1	Daftar <i>Key Informant</i>	60
Tabel 4.1	Data Kependudukan Kecamatan Palmerah	66
Tabel 4.2	Data Kependudukan Sesuai dengan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.3	Data Perbandingan Jumlah Penduduk	67
Tabel 4.4	Data E-Warong KUBE PKH se Kecamatan Palmerah	73

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Berpikir	55
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kecamatan Palmerah	65
Gambar 4.1	Peralatan E-Warong KUBE PKH <i>Freezer</i>	69
Gambar 4.2	Struktur E-Warong KUBE PKH	70
Gambar 4.3	E-Warong KUBE PKH	72
Gambar 4.5	Pola Pemungkinan E-Warong KUBE PKH	81
Gambar 4.6	Pertemuan Rutin Evaluasi E-Warong KUBE PKH	84
Gambar 4.7	Etalase E-Warong KUBE PKH	86
Gambar 4.8	Mesin EDC Bank BNI'46	87
Gambar 4.9	Buku E-Warong KUBE PKH	87
Gambar 4.10	Pelatihan Tata Boga	88
Gambar 4.11	Kunjungan Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat	93

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat dimana masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan bahkan terkait dengan kebutuhan pendidikan, dengan demikian diperlukan program dan kebijakan dari pemerintah dalam menanggulangi kondisi kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 8%- 10%. Penurunan kemiskinan yang ingin dicapai terdapat dalam Program Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah disampaikan dalam buku Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diterbitkan oleh Sekretariat TNP2K. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut akan menjadi program yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota secara terencana, bersinergi serta sistematis bersama dengan dunia sektor swasta serta masyarakat sehingga mempercepat dalam mengurangi angka atau penduduk miskin serta untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memiliki strategi dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yakni dengan cara mengurangi biaya dalam hal pengeluaran kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemampuan penghasilan yang dimiliki masyarakat kurang mampu, pemerintah akan menjamin usaha dan mengembangkan usaha serta pemerintah akan melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan

strategi percepatan tersebut dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat menjadi TNP2K. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomot 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adapun tugas dari Tim tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tim bertugas dalam menyusun kebijakan serta program pemerintah dalam melakukan penanggulangan kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia.
- b. Tim bertugas dalam melakukan sinergitas dengan integritas, sinkronisasi, dan harmonisasi pada kegiatan penanggulangan kemiskinan di Lembaga Negara serta Kementerian Negara.
- c. Tim bertugas melaksanakan pengendalian serta juga pengawasan dalam implementasi program pemerintah dalam kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan program upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya tetap melanjutkan program pemberian subsidi yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh Pemerintah yaitu dengan memberikan Beras Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra) di Indonesia. Tujuan utama dari program tersebut agar masyarakat yang terdaftar dalam penerima Rastra dapat memperkuat ketahanan pangan.

Tabel 1.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

No.	Program Pemerintah	Harga Beras	Jatah Beras	Tahun
1.	Beras Miskin (Raskin)	Rp.1.000,-/kg	15 kg/ KK	2005
2.	Beras Miskin (Raskin)	Rp. 1.600,-/kg	15 Kg/KK	2008
3.	Beras Sejahtera (Rastra)	Rp.1.600/kg	15 Kg/ KK	2016

Jika dilihat dari table 1.1 Program Penanggulangan Kemiskinan antara Beras Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program yang sama dalam pemberian bantuan kepada masyarakat, selain itu sasaran dari program tersebut sama yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk program subsidi Rastra telah berjalan hingga tahun 2016, pemberian subsidi Rastra tersebut masih

dimaksudkan agar dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Terkait dengan penyaluran Raskin dilakukan di Kantor Kelurahan atau Balai Desa masing-masing.

Pada hal penentuan penetapan penerima Raskin atau Raskin setiap tahun menjadi persoalan di masyarakat dan penggunaan data dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Badan Pusat Statistik sebagai data dasar pelaksanaan penyaluran Raskin juga menjadi persoalan di masyarakat diantara persoalan yang timbul seperti masih terdapat nama orang yang sudah meninggal tertera di penerima raskin, masih munculnya data warga yang sudah diusulkan untuk dicoret dikarenakan warga tersebut sudah mampu dalam perekonomian seperti memiliki kontrakan dan memiliki usaha atau toko. Untuk meminimal kesalahan pemberian Raskin kepada masyarakat tingkat Desa atau Kelurahan diminta untuk melaksanakan verifikasi melalui pelaksanaan musyawarah ditingkat Desa ataupun Kelurahan dengan mengikutsertakan pihak RW ataupun perangkat wilayah di masing-masing Desa ataupun Kelurahan.

Penanggulangan kemiskinan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dilaksanakan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia. Untuk diketahui bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan merujuk data kemiskinan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1.	September 2016	385.840	3,75%
2.	Maret 2017	389.690	3,77%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Jika dilihat pada tabel 1.2 dijelaskan bahwa di Provinsi DKI pada bulan Maret 2017 memiliki jumlah penduduk miskin hingga 389.690 jiwa dan pada bulan September di tahun 2016 berjumlah 385.840 jiwa, sehingga jika

dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah penduduk yang berkategori miskin bertambah sejumlah 3.850 jiwa, dengan masih banyaknya jumlah kemiskinan yang ada di Jakarta maka Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dipandang masih perlu melakukan penanggulangan kemiskinan dengan program-program pemberdayaan masyarakat ataupun pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Indonesia.

Pada tahun 2017 khusus untuk pemberian bantuan subsidi beras melalui Rastra tidak lagi dilakukan tetapi diganti dengan bantuan dengan sistem non tunai termasuk di Provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam mewujudkan suatu efektivitas serta ketepatan dalam sasaran penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah dan juga agar dapat mendorong keuangan yang bersifat inklusif. Mekanisme pemberiannya juga berbeda antara Rastra dan bantuan sosial yang bersifat non tunai atau disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pada pemberian Bantuan Pangan Non Tunai penerimanya adalah keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan secara non tunai.

Tabel 1.3 Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial

No.	Mekanisme	Tahun	Jenis Bantuan
1.	Beras Miskin	2006	Sembako dalam bentuk Beras
2.	Beras Sejahtera	2016	Sembako dalam bentuk Beras
3.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2017	Bantuan Non Tunai sebesar Rp. 110.000,-
4.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Januari 2020	Bantuan Non Tunai sebesar Rp. 150.000,-
5.	Program Sembako BPNT	April 2020	Bantuan Non Tunai sebesar Rp. 200.000,-

Sumber : Kementerian Sosial RI

Dengan melihat table 3.1 diatas dapat dilihat perubahan-perubahan mekanisme dalam pemberian bantuan sosial dari pemberian Beras Miskin (raskin)

hingga menjadi Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai, mulai tahun 2017 bantuan sosial berubah menjadi bantuan dalam bentuk non tunai yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai, dimana akan diberikan sebuah kartu keluarga sejahtera dalam bentuk ATM yang didalamnya sudah terdapat nominal uang non tunai Rp.110.000,-/bulan, bantuan tersebut tidak dapat ditarik tunai di mesin ATM hanya bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan sembako di Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membelanjakan dengan Kartu ATM tersebut. Adapun barang atau komunitas yang dapat dibelanjakan berupa beras, telur, gula pasir, minyak goreng dan daging sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Tujuan dalam pemberian Bantuan Pangan Non Tunai yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga selaku KPM, selain itu Bantuan Pangan Non Tunai juga memiliki tujuan untuk meningkatkan nutrisi pangan sehari-hari agar menjadi lebih baik serta mendapatkan gizi yang seimbang dikarenakan Bantuan Pangan Non Tunai ini mendapatkan sembako yang lebih banyak tidak hanya beras saja, kemudian dijadikannya bantuan sosial menjadi Bantuan Pangan Non Tunai juga dapat menjadikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Pada tahun bulan Januari 2020 melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah mengembangkan Program Bantuan Pangan Non Tunai berubah menjadi Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai dengan peningkatan jumlah bantuan yang diterima dari Rp.110.000,- setiap bulannya per penerima jadi Rp. 150.000,- setiap bulannya per penerima dan pada bulan April 2020 bantuan non tunai menjadi Rp. 200.000,- setiap bulannya per penerima, dengan adanya peningkatan tersebut maka diharapkan komoditas bahan pangan yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat dapat meningkatkan atau bertambah nilai gizi nya bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam mendukung penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai maka pemerintah merancang dan mengagas Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) yang dapat memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat dalam

memanfaatkan bantuan non tunai yang didapat dengan membelanjakan kebutuhan sehari-hari berupa sembako di E-Warong.

Untuk menjalankan dan mengelola E-Warong pemerintah merancang sebuah program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola E-Warong maka kepemilikan dan pengelolaan E-Warong berasal dari KPM yang membentuk Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) terdiri 3 orang pengurus yaitu Ketua dan juga anggota, Sekretaris dan juga anggota dan Bendahara dan juga anggota serta 4 anggota lainnya.

E-Warong yang telah dibentuk merupakan warung yang bersifat gotong-royong yang melibatkan Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE-PKH, sehingga terkait dengan itu, pemerintah telah membentuk program masyarakat. Tujuan utama dilibatkannya atau diikutsertakannya Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE-PKH adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota KUBE PKH sehingga pendapatan dan perekonomiannya dapat meningkat. Selain itu, diharapkan kedepannya E-Warong yang dikelola oleh KUBE PKH dapat terus beroperasi sehingga E-Warong dapat menjadi sebuah toko atau warung dalam menjual selain sembako Bantuan Pangan Non Tunai misalnya seperti hasil-hasil karya KUBE PKH atau anggota lainnya.

Terkait dengan tujuan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan E-Warong oleh KUBE PKH peneliti tertarik terhadap tahapan proses pemberdayaan dalam pembentukan E-Warong dan apakah strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan oleh Pemerintah kepada Pengelola E-Warong dapat berhasil dengan baik sehingga tujuan-tujuan dari pemberdayaan tersebut dapat berhasil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi pengelolanya. Terkait program ini yang dimulai pada tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan pembentukan E-Warong KUBE PKH diantaranya pemahaman keluarga penerima manfaat terkait E-Warong KUBE PKH yang minim serta calon pengelola E-Warong yang memiliki pendidikan rendah sehingga pengetahuan tentang berwirausaha minim.

Pembentukan E-Warong sangat mendapat dukung oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan bukti bahwa Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan pemerintah berupa Permensos No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH. Merujuk dalam pendirian Keluarga Penerima Manfaat yang mendirikan E-Warong mendapatkan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha sejumlah Rp. 30.000.000,- yang dipergunakan untuk merenovasi ruangan E-Warong, pembelian peralatan pendukung seperti lemari serta rak untuk menempatkan barang yang akan di jual yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- kemudian sebagai modal awal dalam berusaha dan biaya operasional kerja sebesar Rp. 20.000.000,-.

E-Warong yang telah terbentuk berfungsi untuk melakukan kegiatan yaitu :

1. Bertugas untuk dapat memberikan pelayanan dalam melakukan pencairan serta menyalurkan bantuan sosial non tunai.
2. Bertugas untuk dapat memberikan pelayanan dalam menjual bahan sembako dengan harga murah kepada KPM yang mendapatkan bansos dalam bentuk non tunai.
3. Bertugas memberikan suatu pelayanan dalam pembayaran rekening listrik, rekening air dan rekening telephone serta tagihan lainnya yang dilakukan secara online.
4. E-Warong bertugas dapat melakukan penjualan dari hasil-hasil karya dari produksi Kelompok Usaha Bersama di masing-masing kelurahan.
5. E-Warong dapat menjadi agen dari Bank dalam rangka penyaluran BPNT..
6. E-Warong diharapkan dapat melakukan usaha sendiri atau secara mandiri dalam mengemas ulang sembako menjadi kemasan dalam berbagai ukuran.

Untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH wajib memiliki Kriteria yang sudah terdapat dalam Permensos No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, antara lain :

1. Tempat E-Warong wajib memiliki jaringan kelistrikan serta jaringan internet.

2. Mampu melayani transaksi penjualan kepada KPM sejumlah 500 KPM hingga 1.000 KPM.
3. Pengelola Elektronik Warong Gotong Royong dapat menggunakan rumah atau ruangan yang dimiliki oleh salah satu pengelola E-Warong sesuai dengan kesepakatan Bersama.
4. E-Warong wajib mampu memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi secara non tunai dalam penyaluran bantuan social BPNT.

Pemerintah mengharapkan setiap kelurahan memiliki E-Warong KUBE PKH untuk menyalurkan BPNT, sehingga masyarakat yang menjadi KPM dapat dengan mudah dalam mencairkan bantuan tersebut. Selain itu, dengan adanya E-Warong dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pengelola khususnya terkait ekonomi dari pengelola atau anggota E-Warong yang berasal dari KPM.

Pembentukan E-Warong KUBE PKH di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan berjumlah 210 E-Warong, di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan data dari situs <http://data.jakarta.go.id> hingga bulan Maret 2018 sudah mencapai 59 E-Warong KUBE PKH berada pada delapan Kecamatan, dengan rincian :

Tabel 1.4 Daftar E-Warong KUBE PKH di Jakarta Barat

Nomor	Kecamatan	Kelurahan	Total E-Warong
1.	Cengkareng	Rawabuaya	2
		Cengkareng Timur	3
		Kapuk	4
		Kedaung Kaliangke	2
		Duri Kosambi	3
		Cengkareng Barat	1
2.	Kalideres	Kamal	3
		Tegal Alur	1
		Pegadungan	2
		Kalideres	2
		Semanan	1

3.	Kembangan	Meruya Selatan	2
		Kembangan Utara	1
		Joglo	1
		Serenseng	1
		Meruya Utara	1
4.	Tambora	Pekojan	1
		Krendang	1
		Jembatan Besi	1
		Tambora	1
		Angke	1
		Duri Selatan	1
		Kalianyar	1
		Duri Utara	1
		Tanah Sereal	1
5.	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	1
		Kedoya Selatan	1
		Sukabumi Utara	1
		Duri Kepa	1
		Kebon Jeruk	1
6.	Grogol Petamburan	Grogol	1
		Jelambar	1
		Tomang	1
		Wijaya Kusuma	1
7.	Taman Sari	Tangki	1
		Pinangsia	2
		Mahpar	1
8.	Palmerah	Palmerah	1
		Kota Bambu Selatan	1
		Kota Bambu Utara	1

		Kemanggisan	1
		Slipi	1
		Jatipulo	1

Merujuk pada tabel diatas Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2018 sudah memiliki 6 E-Warong terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Palmerah. Dengan terbentuknya E-Warong KUBE PKH diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Palmerah. Berdasarkan data dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk Kecamatan Palmerah pada tahun 2017 hanya ada satu E-Warong KUBE PKH yang terbentuk yang seharusnya pada tahun 2017 sudah dapat terbentuk di enam kelurahan se Kecamatan Palmerah dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan E-Warong KUBE PKH yakni kesiapan keluarga penerima manfaat untuk menjadi pengelola E-Warong KUBE PKH.

Proses pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya dalam tidak melibatkan Pihak Kelurahan tetapi langsung dimotori oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga pihak Kelurahan tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan tempat E-Warong KUBE PKH. Hal ini terlihat dengan koordinasi antara KUBE PKH dan Pihak Kelurahan tidak sinergis sehingga Ketika diawal Kelurahan tidak mengetahui pengelola E-Warong KUBE PKH.

Selain itu pada awal pelaksanaan penyaluran terlihat terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat kurang maksimalnya dalam proses penyaluran seperti kurang mendukungnya lokasi dalam pendistribusian, sosialisasi kepada para Keluarga Penerima Manfaat sehingga penyaluran dilihat belum optimal, belum adanya transparansi nominal harga barang, KPM belum dapat memilih komunitas/barang yang diinginkan, ketersediaan alat gesek/mesin EDC hanya 1 sehingga dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses transaksi,

Sumber Daya Manusia dalam mengelola E-Warong belum terorganisir dan peralatan E-Warong yang dimiliki di beberapa E-Warong tidak lengkap seperti timbangan.

Permasalahan yang dihadapi ketika diawal terbentuknya E-Warong KUBE PKH akan berakibat dalam tujuan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Para pengelola E-Warong KUBE PKH akan merasa kesulitan dalam mengembangkan E-Warong walaupun permodalan diawal telah diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tetapi dukungan lain kurang didapat oleh KUBE PKH dalam mengelola E-Warong. Selain itu KPM yang mendapatkan BPNT tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga penghasilan yang didapat kurang dapat memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga perekonomian Keluarga Penerima Manfaat bisa dikategorikan masyarakat kurang mampu.

Peneliti tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dari program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan E-Warong oleh KUBE PKH perlu adanya peran yang lebih dari pemerintah sehingga program dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan suatu berdampak yang signifikan pada kehidupan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama dalam mengelola E-Warong.

Dengan demikian peneliti akan meneliti permasalahan dan strategi pemberdayaan Pemerintah pada program pemberdayaan masyarakat sehingga berdampak pada tujuan program pemberdayaan masyarakat yaitu dapat membantu menyejahterakan masyarakat. Pada penelitian yang akan dilakukan untuk mencari strategi pemberdayaan masyarakat, peneliti akan menggunakan aspek-aspek pendekatan yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH. Program yang dilaksanakan pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang ataupun oleh Pihak Ketiga, menurut Suharto (2014, h.66) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat pendekatan pemberdayaan agar dapat berjalan dengan tepat, pendekatan tersebut dapat disingkat menjadi 5 P yaitu :

1. Pemungkinan/Penyekatan Budaya dan Struktural.

Pada pendekatan ini dapat dilihat dalam melahirkan suatu kondisi dan juga nuansa didalamnya memungkinkan suatu kemampuan atau kekuatan di dalam masyarakat dapat berkembang dengan optimal dan baik. Dengan demikian pendekatan ini melihat suatu program pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu terbebas dari kondisi budaya negatif yang sudah terbentuk lama serta pemahaman sifat kultural yang sudah ada dan terbentuk yang dapat menjadi hambatan di lingkungan masyarakat.

2. Penguatan

Pendekatan aspek ini dapat dilihat dan diartikan bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penguatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kurang mampu/miskin sebagai target dari program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat melahirkan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menunjang kemandirian.

3. Perlindungan

Pendekatan ini dapat dilihat dan diartikan bahwa pendekatan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat melindungi masyarakat miskin yang menjadi target dari program pemberdayaan masyarakat, dengan harapan agar masyarakat miskin tidak tertindas oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan, dengan demikian untuk menghindari terjadinya persaingan diantara keduanya, selain itu agar mencegah timbulnya eksploitasi masyarakat kuat terhadap masyarakat yang lemah. Pemerintah dalam program pemberdayaan wajib mampu menghapus segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat yang lemah.

4. Penyokongan, pada aspek pendekatan penyokongan dapat dilihat dan dijelaskan bahwa pendekatan ini pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dapat memberikan berbagai macam bimbingan dan juga memberikan berbagai bentuk dukungan sehingga kelompok masyarakat miskin yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat mampu dalam menjalankan tugas dan

fungsinya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat diminta untuk dapat menyokong kelompok masyarakat miskin agar menjadi kuat sehingga tidak terjatuh dan terjelumuskan ke kondisi yang makin lemah serta tidak terpinggirkan di dalam lingkungan bermasyarakat.

5. **Pemeliharaan**, pada pendekatan ini dapat dilihat dan diartikan bahwa pendekatan pemeliharaan yang diimplementasikan pemerintah pada program pemberdayaan masyarakat wajib dapat menjaga dan memelihara suatu kondisi agar tercipta kondisi yang kondusif sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara berbagai kelompok masyarakat. Pada pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjamin dan menciptakan suatu keselarasan dan juga keseimbangan sehingga setiap orang mendapatkan dan memperoleh suatu kesempatan dalam berusaha yang sama.

Aspek-aspek pendekatan dari 5P yang disebutkan oleh Suharto (2014, h.66), dari 5 aspek yang disampaikan peneliti akan mengambil 3 aspek yaitu aspek pemungkinan, aspek penyokongan dan aspek pemeliharaan. . terkait 2 aspek yang tidak diambil peneliti sebagai dasar teori dikarenakan aspek penguatan sama halnya dengan aspek penyokongan dalam memberikan support/dukungan kepada pengelola E-Warong sedangkan aspek perlindungan merupakan aspek yang sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi warga miskin.

Peneliti melihat dengan adanya tiga aspek tersebut suatu pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong menjadi aspek yang utama dalam penelitian yang dapat mendukung berjalannya pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong yang baru berjalan 4 tahun. Selain itu 3 aspek tersebut merupakan aspek yang relevan pada kondisi saat ini dalam mengembangkan dan mendukung dalam program E-Warong di Kota Administrasi Jakarta Barat, karena dapat memberikan dorongan agar pemberdayaan masyarakat tersebut dapat berjalan tahap demi tahap. Kemudian dengan 3 aspek tersebut dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya yang hanya meneliti Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Dalam hal penelitian ini Pembentukan pengelola E-Warong merupakan suatu pemberdayaan masyarakat yang tujuan utamanya agar Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE pada E-Warong dapat meningkatkan kesejahteraan pada Keluarga penerima Manfaat tersebut merupakan masyarakat dengan golongan tidak mampu. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini perlu dikaji dan diteliti terkait dengan strategi-strategi, apakah strategi yang dilakukan sudah baik dan berhasil atau belum. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat kurang mampu

B. Identifikasi Masalah

Jika dilihat pada penjelasan latar belakang sebelumnya, dengan demikian peneliti mendapatkan permasalahan yang teridentifikasi antara lain :

1. Kurang mendukungnya lokasi E-Warong dalam pendistribusian
2. sosialisasi kepada para Keluarga Penerima Manfaat sehingga penyaluran dilihat belum optimal
3. belum adanya transparansi nominal harga barang yang dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat
4. Keluarga Penerima Manfaat belum dapat memilih komunitas/barang yang diinginkan.
5. Sekat budaya dan struktural yang ada di masyarakat menghambat dalam program pemberdayaan masyarakat.
6. ketersediaan alat gesek/mesin EDC hanya 1 sehingga dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses transaksi
7. Sumber Daya Manusia dalam mengelola E-Warong KUBE PKH belum terorganisir
8. Sarana E-Warong yang dimiliki di beberapa E-Warong tidak lengkap

C. Rumusan Masalah

Sesuai uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, peneliti akan merumuskan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH ditinjau dari aspek pendekatan pemungkinan dalam membuat masyarakat berkembang?
2. Bagaimanakah strategi program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH ditinjau dari aspek pendekatan penyokongan?
3. Bagaimanakah strategi program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH ditinjau dari aspek pendekatan pemeliharaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dari strategi pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui aspek pendekatan pemungkinan, aspek pendekatan penyokongan dan aspek pendekatan pemeliharaan serta dapat mengetahui strategi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Tujuan ini diharapkan dapat menyusun strategi pemberdayaan sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dipecahkan atau dapat diantisipasi sehingga program pelaksanaan pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Penelitian ini agar dapat memberikan berbagai manfaat dan juga dapat memberikan suatu kontribusi dalam pembangunan daerah dan khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat dalam jaringan pengaman sosial

2. Praktis

Penelitian ini memiliki harapan bahwa hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi Kementerian Sosial agar program strategi pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH menjadi lebih efektif.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**